



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 2515 ✓ Tgl. Masuk : 12/1/2014
No. Surat : 0320/M.PPN/11/2014 Tgl. Surat : 25 November 2014
Dari : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ka. BPPN A/F/T *) : A
Isi ringkas : Capaian Inpres No. 2 Tahun 2014 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, periode B09
Lampiran :

Sifat : Sangat Rahasia Biasa Rahasia
Klasifikasi : Kilat Segera Sangat segera Biasa

Disposisi Kepada :

Sekretariat Utama Dep. Keuangan Daerah Inspektorat
 Dep. Perekonomian Dep. Akuntan Negara Kapuslitbangwas
 Dep. Polsoskam Dep. Investigasi Kapusdiklatwas
 Perw. *Sekeloa* Kapusbin JFA
 Kapusinfowas

Petunjuk :

Setuju Sesuai catatan Dampingi
 Tolak Untuk perhatian Bicarakan dng. Saya
 Jawab Untuk diketahui Ingatkan
 Teliti dan pendapat Edarkan Agendakan
 Selesaikan Siapkan Bahan Simpan
 Koordinasi/ monitor Harap hadir/ wakil. CopyX, Asli

CATATAN :

an

Perhatian : Dilarang memisahkan sehelai kertaspun yang tergabung dalam berkas ini
*) Keterangan : A- Asli, F- Faximile, T- Tembusan



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 0320 /M.PPN/11/2014

Jakarta, 25 November 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Capaian Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(Aksi PPK) Tahun 2014 Periode B09

Kepada Yth.

Para Menteri dan Pimpinan Lembaga
di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2014, diterbitkan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2014. Inpres ini merupakan penjabaran dari Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Selanjutnya, terkait capaian pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2014 periode Triwulan I (B04), Triwulan II (B06) dan Triwulan III (B09) yang dilaksanakan oleh 82 Kementerian/Lembaga adalah:

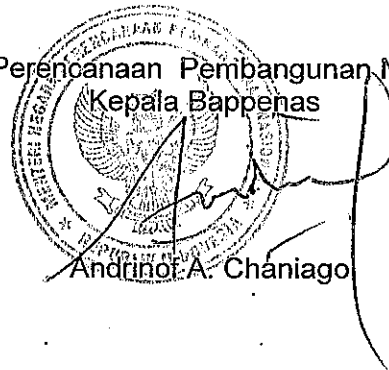
Capaian		Triwulan I (B04)	Triwulan II (B06)	Triwulan III (B09)
Mengecewakan/Tidak Tercapai		156	167	148
Perlu perhatian/Kurang sempurna		35	34	58
Memuaskan/Tercapai		599	673	579
Sangat Memuaskan/Melebihi target		11	6	6
Tidak ada target/milestone		168	89	178

2. Apresiasi kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang telah mendukung pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2014. Secara khusus apresiasi kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang seluruh targetnya dapat tercapai;
3. Kami telah melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang capaiannya mengecewakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Kami harapkan kendala tersebut dapat diatasi untuk periode pelaporan triwulan IV (B12), yang merupakan target akhir;

4. Kementerian/Lembaga yang aksinya tidak tercapai, diharapkan dapat segera menyelesaikan dan menyampaikan data dukung kepada kami;
5. Capaian pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2014 periode Triwulan III (B09) akan disampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta dipublikasikan;
6. Target Akhir (B12) akan bersifat biner, yaitu: hijau menandakan tercapai atau merah menandakan tidak tercapai. Oleh karena itu, kami harapkan untuk pelaporan triwulan IV (B12) dapat dilaksanakan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu serta adanya perbaikan kinerja.
7. Untuk memberi gambaran yang lebih detail, kami lampirkan capaian masing-masing Kementerian/Lembaga;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ⓜ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas



Andriat A. Chaniago

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri; dan
6. Sekretaris Kabinet.

Lampiran Surat

Nomor : 0320/MPPN/11/2014

Tanggal : 25 November 2014

Daftar Penerima Surat

1. Menteri Koordinator bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman
4. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Luar Negeri
8. Menteri Agama
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah
14. Menteri Perdagangan
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16. Menteri Perhubungan
17. Menteri Perindustrian
18. Menteri Pertahanan
19. Menteri Pertanian
20. Menteri Kelautan dan Perikanan
21. Menteri Kesehatan
22. Menteri Keuangan
23. Menteri Komunikasi dan Informatika
24. Menteri Sosial
25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
26. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
28. Menteri Pariwisata
29. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Menteri Pemuda dan Olah Raga
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
33. Menteri Perumahan Rakyat
34. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
35. Sekretaris Kabinet
36. Jaksa Agung
37. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
38. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
39. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
40. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
41. Kepala Badan Kepegawaian Negara
42. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
43. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

44. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
45. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
46. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
47. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
48. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
49. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
50. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
51. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
52. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
53. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
54. Kepala Badan SAR Nasional
55. Kepala Badan Standarisasi Nasional
56. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
57. Ketua Komisi Informasi Pusat
58. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
59. Kepala Lembaga Administrasi Negara
60. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
61. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
62. Kepala Lembaga Ketahanan Nasional
63. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
64. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
65. Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
66. Kepala Perpustakaan Nasional
67. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
68. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
69. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
70. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
71. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
72. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
73. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
74. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
75. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
76. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
77. Sekretaris Mahkamah Agung
78. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
79. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
80. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia
81. Direktur Utama Radio Republik Indonesia

Capaian Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi PPK Tahun 2014 – Periode Triwulan I (B04), Triwulan II (B06) dan Triwulan III (B09)

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	B04				B06				B09				TOTAL SUB AKSI			
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	1		4	1	1			3	1	3	2		2	1	2	7
2	Badan Informasi Geospasial (BIG)			7	1				2		6	1		5		2	8
3	Badan Intelijen Negara (BIN)								5		2	1		2		4	7
4	Badan Kepegawaian Negara	1	2	9	1	4	2		12		3	6		5	2	4	17
5	Badan Kependudukan Keluarga Berencana nasional (BKKBN)	1							7		1	1		6	1		8
6	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)			9					9			1		8			9
7	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)			7	2				8		1	1		5		3	9
8	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1	1	7			1		6	1	1	2		5	1	1	9
9	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)								2		6	1				7	8
10	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)			6		2			7	1		1		4	1	2	8
11	Badan Nasional Pengelola Perbatasan								5	1	2	1				7	8
12	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3		9			4		6	1	1	2		3	2	5	12
13	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)			9					9					6		3	9

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	B04				B06				B09				TOTAL SUB AKSI	
14	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	3			7	1	3	1	5	2		2	6	10	
15	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2		9	1	1	5	1	5	3		5	1	3	12
16	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1		4	5		7	1	2	2	1	7		10	
17	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi			7	1		8			1		6	1	8	
18	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	6		13		4	10		5	3		13	1	2	19
19	Badan Pusat Statistik (BPS)	1		10			11			1		10		11	
20	Badan SAR Nasional			2	6		3		5	1		5		2	8
21	Badan Standarisasi Nasional	1		6	1		8			2		6		8	
22	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	1		5	1		7			2		5		7	
23	Dewan Ketahanan Nasional			8			8			1		6	1	8	
24	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah				7				7	1			6	7	
25	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat				7		5		2	1		1	5	7	
26	Kejaksaan Agung	18	1	29		6	1	40	1	4	1	35	1	7	48
27	Kementerian Agama	3		15	1	3		14	1	2		9	8	19	
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	2		6	2	1		10		2		8	1	11	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	B04					B06					B09					TOTAL SUB AKSI
29	Kementerian Dalam Negeri	5		14	1		4		16			7		12	1		20
30	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	5	1	9	1	4	5		10		5	4		10	1	5	20
31	Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia	9		25		2	5		23	2	6	4		30		2	36
32	Kementerian Kehutanan	5	1	10			5	1	9		1	3	1	12			16
33	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2		8	1				11			2		8	1		11
34	Kementerian Kesehatan	5	1	11			3	1	13			3	1	13			17
35	Kementerian Keuangan	7		18			4		21			3		22			25
36	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2		11	1				11	1	2	1		12	1		14
37	Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat			4	1	2			2	2	3	1		2	1	3	7
38	Kementerian Koordinator bidang Perekonomian			6	1	1			7		1	1		6		1	8
39	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		2	6				1	7			1	1	6			8
40	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1		5		4			8		2	2		8			10
41	Kementerian Lingkungan Hidup			7					7			1		6			7
42	Kementerian Luar Negeri		1	8		1			10			1		8	1		10

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	B04				B06				B09				TOTAL SUB AKSI			
43	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			8				7	1				1	7		8	
44	Kementerian Pekerjaan Umum	5		13	1			7	1	9	2		6	9	3	1	19
45	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	3		8				3		7		1	2	7	1	1	11
46	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		6						7			2	5			7
47	Kementerian Pemuda dan Olah Raga			5	1	4				4		6	1	2	2	5	10
48	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3		7	1	2				8	2	3	4	5	1	3	13
49	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6		6		7		6		11		2	5	13	1		19
50	Kementerian Perdagangan	2		6	2					9		1	1	8	1		10
51	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	3		9					1	9	2		2	10			12
52	Kementerian Perhubungan	6		15				3		18			3	17		1	21
53	Kementerian Perindustrian			7	1			1		7			2	6			8
54	Kementerian Pertahanan			9						9			1	5	3		9
55	Kementerian Pertanian	5		12	1			3		13	2		2	12	1	3	18
56	Kementerian Perumahan Rakyat			6	4					3		7	1	5	2	2	10
57	Kementerian Riset dan Teknologi			7	1					8			1	7			8

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	B04				B06				B09				TOTAL SUB AKSI			
58	Kementerian Sosial	3		7		2	3		5	3	1	2		9		1	12
59	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3		9		1	1		12			3		9	1		13
60	Kepolisian Republik Indonesia	16		34			5		44		1	15		34		1	50
61	Sekretariat Komisi Informasi Pusat			1					1					1			1
62	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia					7					7	1				6	7
63	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	5				9	1		4		9	6		5		3	14
64	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	4		3		1			4	3	1	2		4		2	8
65	Lembaga Administrasi Negara	1		5	3	1			7		3	3		3	1	3	10
66	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia			7					6	1		1		2	2	2	7
67	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)			7					7			1		6			7
68	Lembaga Ketahanan Nasional	1		9					10			2		5		3	10
69	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)			7	1	1			9			1		7		1	9
70	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1		1			1		1			1		1			2
71	Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)					7					7	2		5			7
72	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat					7					7	1		2	2	2	7

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	B04					B06					B09					TOTAL SUB AKSI
73	Perpustakaan Nasional	1				8					9	1	1	4	1	2	9
74	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1		11					12			2		5	1	4	12
75	Radio Republik Indonesia					11			4		7	1				10	11
76	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1		9					10			1		9			10
77	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia	3		6	1		3		5	1	1	4		5	1		10
78	Sekretariat Kabinet (SETKAB)			7					7			1		6			7
79	Sekretariat Mahkamah Agung	1	1	9	1				6	2	4	3		5	1	3	12
80	Sekretariat Mahkamah Konstitusi			7							7	1		1	4	1	7
81	Sekretariat Negara (SETNEG)	2		8			3		7			4		6			10
82	Televisi Republik Indonesia	5		5		3			8		5	3		4	1	5	13
	Grand Total	168	11	599	35	156	89	6	673	34	167	178	6	579	58	148	969